

ISIS Klaim Bom Bunuh Diri Kembar Baghdad, Korban Tewas 32 Orang

BAGHDAD(IM) - Kelompok ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri kembar yang mengguncang Ibu Kota Irak, Baghdad, pada Kamis. Korban tewas hingga Jumat (22/1) telah bertambah menjadi 32 orang. Awalnya dilaporkan korban tewas dalam dua serangan bom bunuh diri itu sebanyak 28 orang dengan korban luka mencapai 73 orang. Kelompok teroris ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) melalui sebuah pesan di saluran Telegram mengklaim bahwa dua orangnya meledakan diri di Tayaran Square di pusat Baghdad. Wartawan Reuters yang tiba setelah ledakan melihat genangan darah dan sepatu yang berserakan di lokasi kejadian, sebuah pasar pakaian di Tayaran Square di pusat kota Baghdad. Otoritas kesehatan mengatakan sedikitnya 110 orang terluka. Serangan dua bom pada hari Kamis terjadi di pasar yang sama dengan serangan besar terakhir pada Januari 2018 yang saat itu korban meninggal mencapai 27 orang. Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi mengadakan pertemuan mendadak dengan komandan keamanan tinggi untuk membahas serangan bom tersebut. Tak lama kemudian, dia memecat pejabat senior, komandan pasukan keamanan dan polisi. Pemerintah Kadhimi mengatakan ada pelanggaran keamanan, yang memungkinkan terjadinya pemboman. Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Daniel Smith, dengan cepat mengutuk serangan teroris tersebut. "Itu adalah tindakan keji dari pembunuhan massal dan pengingat serius akan terorisme yang terus mengancam nyawa warga Irak yang tidak bersalah," katanya. Smith menjabat sampai Anthony Blinken, calon Menteri Luar Negeri pilihan Presiden Joe Biden dikonfirmasi oleh Senat. **gul**



LOKASI SERANGAN BOM BUNUH DIRI DI BAGHDAD

Lokasi serangan bom bunuh diri di pusat pasar di Baghdad, Irak, Kamis (21/1).

Biden Siap Kembalikan Posisi AS sebagai Superpower

AS dinilai sedang berada di titik terendah di segala lini sehingga Biden akan fokus terlebih dahulu membenahi masalah domestik.

WASHINGTON(IM)- Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden diperkirakan memerlukan waktu relatif lama untuk mengembalikan negara itu sebagai superpower. Ini karena saat ini AS dinilai sedang berada di titik terendah di segala lini sehingga Biden akan fokus terlebih dahulu membenahi masalah domestik.

Menyadari peliknya persoalan domestik di negaranya, Presiden yang berasal dari Partai Demokrat itu pun langsung tanp gas menandatangani 17 perintah eksekutif hanya beberapa jam setelah dilantik. Langkah itu merupakan upaya paling cepat dan agresif dalam membatalkan semua legasi Donald Trump, presiden sebelumnya. Selain perintah eksekutif, Biden juga menandatangani memorandum dan perintah ke lembaga federal.

"Tidak ada waktu untuk memulai seperti hari ini. Saya akan mulai mewujudkan janji yang saya buat untuk rakyat AS," kata Biden di Oval Office kepada para jurnalis, dilansir Reuters, Jumat (22/2).

Sektor ekonomi menjadi salah satu target pemulihan domestik ala Biden. Dengan tegas

dia menyatakan pekan depan akan mengampunatkan "Beli Produk AS" di mana ada kewajiban bagi pemerintah untuk membeli produk dari perusahaan AS. Terkait kebijakan ini, rupanya Biden sepeham dengan Trump yang selama memimpin AS kerap mempromosikan 'made in America'.

Setelah pada Januari ini fokus untuk menangani permasalahan domestik AS, bulan berikutnya pemerintahan Biden akan fokus merestorasikan posisi AS di dunia.

Dalam pandangan analisis politik American University of Paris, Marwan Bishara, salah satu upaya menjadikan AS sebagai pemimpin dunia adalah mengubah kebijakan yang sudah dibuat oleh Donald Trump yang dinilai telah merugikan AS. Namun demikian, Biden harus melakukan itu dengan hati-hati karena memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial karena Partai Republik tetap memiliki pendukung.

"Setiap Demokrat yang berkuasa dan memenangkan pemilu pasti akan membersihkan sisa kebijakan Partai Republik," katanya.

Biden juga menghentikan pendanaan pembangunan tembok perbatasan ala Trump. Se-

lain itu, dia juga membatalkan larangan berpegangan ke dan dari 13 negara Muslim. Biden memulai proses kembali ke kesepakatan iklim paris dan bergabung kembali ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menunjuk Anthony Fauci, pakar penyakit infeksi, sebagai delegasi AS.

"Larangan berpegangan itu tidak sesuai dengan nilai AS dan itu akan menghidupkan kembali kredibilitas AS di panggung global," kata Bishara.

Mengembalikan AS sebagai negara adidaya dan pemimpin dunia juga diungkapkan Biden dalam pidato pelantikannya, "renewal and resolve." Hal tersebut sekaligus menjadi beban berat Presiden ke-46 itu untuk menyembuhkan demokrasi AS di dunia yang terlihat suram dan muram.

Namun, itu semua tak akan terwujud dalam persatuan dan menyucikan kembali demokrasi di seluruh AS. Pete Betts, peneliti di think tank berbasis di London, Chatham House, mengungkapkan bahwa AS akan mewujudkan janji untuk berkomitmen terhadap keuangan dalam penanganan perubahan iklim. AS selama pemerintahan Barack Obama berjanji memberikan USD3 miliar untuk Green Climate Fund, namun baru terealisasi USD1 miliar.

Tak banyak pesan kebijakan luar negeri yang diungkapkan Biden. Dia hanya menjamin bahwa seluruh dunia melihat apa yang dilakukannya untuk AS untuk bisa mampu kembali sebagai mitra global.

Dia pun berjanji memperbaiki aliansi dan berkerja sama dengan dunia sebagai mitra yang bisa dipercaya untuk perdamaian dan keamanan. Biden akan kembali memimpin NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) dan memulihkan pendekatan multilateral.

Di sektor perekonomian

dan perubahan iklim, pemerintahan Biden akan mendorong para pemain ekonomi kembali meningkatkan kecepatan untuk mennggal ketinggalan selama empat tahun terakhir. Sinergisitas sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian AS. Itu tentunya juga perlu kesepakatan antara pemerintah, pengusaha, investor hingga kalangan pekerja.

Cara itu termasuk bagaimana AS mampu memimpin agar dunia bisa mengendalikn perubahan iklim dan tetap mendorong peningkatan ekonomi. Pete Betts, peneliti di think tank berbasis di London, Chatham House, mengungkapkan bahwa AS akan mewujudkan janji untuk berkomitmen terhadap keuangan dalam penanganan perubahan iklim. AS selama pemerintahan Barack Obama berjanji memberikan USD3 miliar untuk Green Climate Fund, namun baru terealisasi USD1 miliar.

"AS harus menempatkan banyak uang di meja dan mendorong negara lain melakukan hal sama," katanya. Pete Betts, peneliti di think tank berbasis di London, Chatham House, mengungkapkan bahwa AS akan mewujudkan janji untuk berkomitmen terhadap keuangan dalam penanganan perubahan iklim. AS selama pemerintahan Barack Obama berjanji memberikan USD3 miliar untuk Green Climate Fund, namun baru terealisasi USD1 miliar.

"AS harus menempatkan banyak uang di meja dan mendorong negara lain melakukan hal sama," katanya. Pete Betts, peneliti di think tank berbasis di London, Chatham House, mengungkapkan bahwa AS akan mewujudkan janji untuk berkomitmen terhadap keuangan dalam penanganan perubahan iklim. AS selama pemerintahan Barack Obama berjanji memberikan USD3 miliar untuk Green Climate Fund, namun baru terealisasi USD1 miliar.

Gagal Selidiki Kematian Pramugari Cantik Filipina, Kepala Polisi Dipecat

MAKATI(IM)- Seorang kepala polisi di Makati, Filipina, dipecat karena mengklaim seorang pramugari cantik diperkosa beramai-ramai dan dibunuh, tapi gagal dalam penyelidikan kasus tersebut.

Pramugari Philippine Airlines (PAL) Express, Christine Agelica Dacera (23), ditemukan tewas di bak mandi kamar hotel di Garden City Grand Hotel di Makati, Filipina, pada Hari Tahun Baru. Dia ditemukan tewas setelah pada malam harinya melakukan pesta dengan belasan pria.

Sebelas pria untuk sementara dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban setelah penyelidikan polisi Makati mengklaim telah menemukan luka di lengan dan kakinya serta jejak sperma di tubuhnya.

Namun tuduhan itu ditepis oleh jaksa penuntut yang mengatakan penyelidikan lebih lanjut termasuk post-mortem mengungkapkan Dacera meninggal karena aneurisma otak. Sekarang, perintah telah dibuat untuk memecat Kepala Polisi Makati Kolonel Harold Depositar setelah menaui kritik besar-besaran untuk penanganan kasus kematian Dacera.

Ibu korban menolak hasil autopsi dan bersikeras bahwa putrinya diperkosa dan dibunuh, dan pembunuhnya harus dimintai pertanggungjawaban. Salah satu rekan korban, Rommel Galida, ditangkap sebagai tersangka. Dia menceritakan bagaimana dia bangun sekitar pukul 10.00 pagi dan melihat korban tertidur di bak mandi.

Dia mengaku menutupi tubuh korban dengan selimut sebelum kembali tidur dan menemukan bahwa korban sakit parah ketika dia bangun kemudian dan membunyikan alarm. Polisi awalnya mengklaim bahwa itu adalah kasus pemerkosaan geng dan dikutip media-media internasional. Namun, klaim itu dibuat tanpa autopsi. Faktanya, jenazah sudah dibalsem dan siap untuk dimakamkan.

Sekarang telah terungkap bahwa semua pria yang terlibat pesta Malam Tahun Baru mengatakan bahwa mereka gay. Autopsi menunjukkan bahwa Dacera diduga meninggal karena aneurisma aorta, jantung pecah yang mungkin disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Namun, belum dikonfirmasi karena jenazahnya sudah dibalsem.

"Jika Anda melihat tubuh Christine, jika Anda adalah ibunya, Anda pasti akan merasakan sakit yang diderita Christine dari mereka tetapi putri saya tidak dapat berbicara lagi karena dia meninggal," kata Ibu Christine, Dacera, kepada program Headstart, seperti dikutip Mail Online, Jumat (22/1).

"Ada luka pada anak saya, memar, kenapa tidak tertulis (dalam autopsi)? Saya tidak dapat menerima autopsi yang telah mereka lakukan. Ada kejahatan, putri saya meninggal. Ada kejahatan," katanya lagi. "Orang-orang yang bertanggung jawab harus dibayar dengan kematian putri saya. Itulah keadilan bagi saya," ujarnya.

Keluarga Dacera sekarang menyerukan agar petugas medico-legal Kepolisian Nasional Filipina dipecat, dengan tuduhan bahwa mereka melakukan kesalahan dalam autopsi. Keluarga percaya bahwa Christine Dacera dibius dan dianiaya sebelum kematiannya.

The New Zealand Herald melaporkan bahwa keluarga tersebut mengklaim korban sudah mengalami keracunan dan mengeluh bahwa minumannya tampaknya telah dibubuhi selama pesta Tahun Baru. "Kami juga percaya bahwa mungkin aneurisma adalah penyebab langsung tetapi juga sangat mungkin dipicu oleh serangan sebelum kematiannya," tulis The Inquirer mengutip pengacara keluarga tersebut, Brick Reyes.

Autopsi kedua akan dilakukan pada tubuh Dacera, kali ini oleh Biro Investigasi Nasional (NBI). Hasilnya diharapkan akan dirilis minggu ini. **gul**

Dunia Kemanusiaan Sambut Traktat yang Larang Senjata Nuklir

JENEWA(IM) - Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional menyambut berlakunya Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) mulai Jumat (22/1). Ini instrumen pertama hukum humaniter internasional yang memasukkan ketentuan-ketentuan untuk membantu mengatasi dampak kemanusiaan luar biasa dari penggunaan dan pengujian senjata nuklir.

"Ini hari kemenangan bagi kemanusiaan. Traktat ini— hasil kerja selama lebih dari 75 tahun—memberi sinyal kuat bahwa senjata nuklir tidak dapat diterima dari sudut pandang moral dan kemanusiaan serta kini dari sudut pandang legal," kata Peter Maurer, Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), dalam keterangan tertulisnya.

TPNW secara eksplisit dan tegas melarang penggunaan, ancaman penggunaan, pengembangan, produksi, pengujian dan penimbunan senjata nuklir. Traktat ini juga mengikat "negara-negara pihak" untuk tidak membantu, mendorong atau membujuk siapa pun dengan cara apa pun untuk terlibat dalam segala aktivitas yang dilarang TPNW ini.

Para pemimpin Palang Merah dan Bulan Sabit Merah menyampaikan penghormatan pada 51 negara atas dukungan mereka terhadap TPNW. Dukungan mereka mempertegas penolakan untuk menerima senjata nuklir sebagai bagian tak terelakkan dari arsitektur

keamanan internasional.

Presiden Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), Francesco Rocca, mengatakan, "Berlakunya instrumen hukum humaniter internasional ini menjadi sambutan dan pengingat yang kuat bahwa terlepas dari ketegangan global saat ini, kita bahkan masih bisa mengatasi tantangan terbesar dan terkuat, dalam semangat multilateralisme sejati."

Pada 24 Oktober 2020, Honduras menjadi negara ke-50 yang meratifikasi TPNW ini. Berdasarkan ketentuannya, TPNW akan mulai berlaku 90 hari sejak 50 negara meratifikasi TPNW. Dengan demikian TPNW secara efektif berlaku mulai Jumat 22 Januari 2021. **ans**



UNJUK RASA AKTIVIS HAK HEWAN

Aktivis hak hewan yang tanpa pakaian dikelilingi salib saat berunjuk rasa menentang penggunaan bulu dan kulit, di Lapangan Sant Jaume di Barcelona, Spanyol, Kamis (21/1). Tulisan pada papan berbunyi "Untuk penutupan peternakan bulu".

AS Baru Mendakwa Hambali Cs setelah Dipenjara Hampir 18 Tahun

WASHINGTON(IM) - Setelah hampir 18 tahun dipenjara, tiga pria yang diduga terlibat dalam pemboman di Bali pada 2002 dan Jakarta 2003 menghadapi dakwaan resmi di pengadilan Amerika Serikat (AS). Mereka adalah warga negara Indonesia (WNI), Riduan Isamuddin alias Hambali dan dua warga negara Malaysia. Menurut pernyataan Pentagon hari ini (22/1), militer AS telah mengajukan dakwaan ke pengadilan militer. Langkah Pentagon ini diambil setelah Joe Biden resmi memulai tugasnya sebagai presiden AS.

Hambali dikenal sebagai salah satu pimpinan kelompok Jemaah Islamiyah (JI). Dua warga negara Malaysia yang juga didakwa militer AS adalah Mohammed Nazir Lep dan Mohammed Farik Amin. Keduanya merupakan pengikut Hambali dan telah menerima pelatihan di bawah komando al-Qaeda.

Laporan AFP mengatakan ketiganya menghadapi berbagai dakwaan termasuk konspirasi, pembunuhan dan keterlibatan dalam kelompok teroris. Sekadar diketahui, Hambali, Nazir dan Farik ditangkap di Thailand. Mereka kemudian ditahan selama lebih dari 14 tahun di Teluk Guantanamo, Kuba. Mereka dituduh membom sebuah klub malam di Bali yang menewaskan 202 orang pada 12 Oktober 2002. Mereka juga didakwa melakukan serangan bom di Hotel JW Mariot Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003. Serangan tersebut mengakibatkan 12 orang tewas dan puluhan luka-luka.

Tidak jelas mengapa AS butuh waktu lama sebelum pengadilan militer AS di Guantanamo mengumumkan dakwaan itu. Pada tahun 2016 Hambali mencoba untuk mendapatkan pembebasan dari kamp penahanan militer AS tetapi ditolak karena jaksa berpendapat dia masih merupakan "ancaman signifikan bagi keamanan AS". **ans**



LATIHAN MILITER KAZAKHSTAN

Prajurit melakukan latihan militer yang diselenggarakan oleh angkatan udara Kazakh, di lapangan target di wilayah Almaty, Kazakhstan, Kamis (21/1).

Ulama Terkemuka Saudi Dipenjara, Putranya Desak Pangeran MBS Membebaskannya

RIYADH(IM) - Ulama terkemuka Arab Saudi, Sheikh Salman Al-Ouda, telah dipenjara sejak 2017 karena menentang blokade terhadap Qatar. Sekarang putranya, Abdullah Al-Ouda, mendesak Pangeran Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) untuk segera membebaskan ayahnya.

Dia menulis seruan pembebasan itu dalam artikel di The Guardian. Dia minta Putra Mahkota MBS menunjukkan komitmennya untuk rekonsiliasi dengan tetangga Teluk-nya yang lebih kecil dengan membebaskan apa yang dia sebut "tahanan hati nurani".

Blokade Qatar oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir diberlakukan pada Juni 2017. Terobosan datang awal bulan ini ketika Riyadh menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin negara yang terlibat, termasuk Qatar, untuk rekonsiliasi.

Terobosan itu diikuti dengan pembukaan perbatasan darat Arab Saudi dengan Qatar, yang membuka jalan untuk meredakan ketegangan dengan negara-negara Arab lainnya. Abdullah Al-Ouda meminta MBS untuk membebaskan warga Kerajaan Arab Saudi sekarang karena perselisihan Teluk telah berakhir.

Sheikh Al-Ouda adalah salah satu dari puluhan pembangkang, penulis, dan ulama yang ditahan pada pertengahan September 2017 dalam tindakan keras negara terha-

dap mereka yang digambarkan sebagai "bertindak untuk kepentingan pihak asing terhadap keamanan Kerajaan dan kepentingannya." Menurut Abdullah Al-Ouda, ayahnya ditangkap karena menolak men-tweet pesan kepada 13 juta pengikutnya untuk mendukung blokade yang dipimpin Arab Saudi terhadap Qatar. Dia malah mengungkapkan keinginan untuk rekonsiliasi dengan men-tweet, "Semoga Allah menyelaraskan hati mereka untuk kepentingan rakyat mereka."

Beberapa hari kemudian, petugas keamanan negara Arab Saudi menangkapnya. Setelah ditahan tanpa dakwaan selama setahun, otoritas Arab Saudi mengajukan 37 dakwaan terhadap Sheikh Al-Ouda. Persidangannya dimulai pada September 2018 di pengadilan Kriminal Khusus, pengadilan terorisme negara itu, di Riyadh.

Tuduhan dalam persidangan yang sedang berlangsung dilaporkan mencakup kegiatan biasa seperti, "keberatan dengan boikot Qatar" dan "mengunjungi Qatar pada banyak kesempatan, termasuk pada 2015". "Karena blokade Qatar tampaknya akan segera berakhir, sudah sepatutnya orang yang berdoa untuk rekonsiliasi juga menemukan bahwa penahanannya telah berakhir," kata Abdullah Al-Ouda, seperti dikutip Middle East Monitor, kemarin (21/1). **gul**